



ARAHAN TERKAIT PENCAPAIAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*

**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

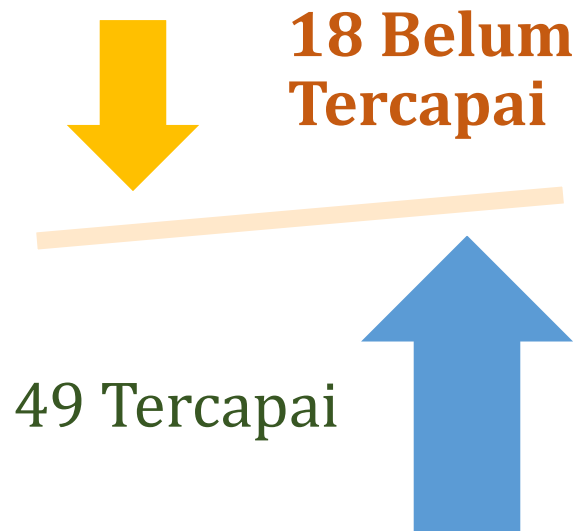
**Disampaikan dalam Sosialisasi Penyusunan RAD TPB/SDGs
Semarang, 15 Desember 2017**



- 1** CAPAIAN MDGS DAN *UNFINISHED AGENDA*
- 2** TPB/SDGS : KEMAJUAN SEMUA BANGSA
- 3** ARAHAN PRESIDEN RI
- 4** PENGARUSUTAMAAN TPB/SDGS DALAM RPJMN 2015-2019
- 5** PRINSIP DAN PARTISIPASI PARA PIHAK
- 6** BATAS WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN TPB/SDGS
- 7** PENDANAAN TPB/SDGS

I. CAPAIAN MDGS DAN *UNFINISHED* AGENDA

Capaian Indonesia pada 2015:
Dari 8 tujuan, 18 target dan
67 indikator MDGs



Keberhasilan MDGS

1. KEMISKINAN DENGAN UKURAN USD 1,00/KAPITA/HARI
2. AKSES PENDIDIKAN DASAR
3. KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN
4. ANGKA KEMATIAN BAYI DAN BALITA
5. PENGENDALIAN PENYAKIT TUBERKULOSIS (TB) DAN MALARIA
6. AKSES TERHADAP AIR BERSIH DAN SANITASI PERKOTAAN
7. PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Agenda MDGs Yang Belum Tercapai

1. KEMISKINAN BERDASARKAN GARIS KEMISKINAN NASIONAL
2. ANGKA KEMATIAN IBU
3. PREVALENSI HIV DAN AIDS
4. TUTUPAN LAHAN
5. AIR MINUM LAYAK PERDESAAN
6. SANITASI LAYAK PERDESAAN

II. TPB/SDGS: KEMAJUAN SEMUA BANGSA



Kemajuan pada satu dimensi membutuhkan keterlibatan aktif dimensi lain;



Katalis untuk kemitraan internasional;



Kepemilikan bersama;



SDGs sebagai kerangka komprehensif, terintegrasi dan tidak terpisahkan.

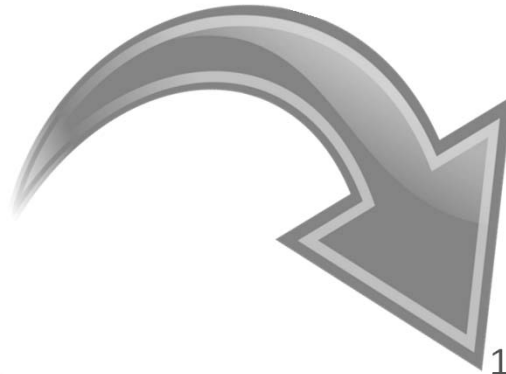
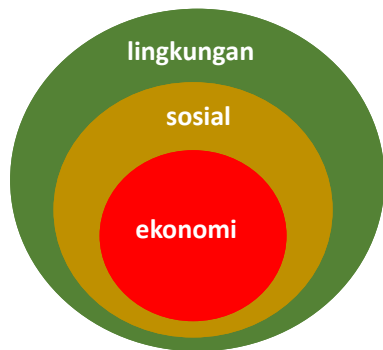
Prinsip Universal SDGs bertujuan untuk kemajuan semua bangsa di dunia

TPB/SDGS Menyempurnakan MDGS

MDGs

8 Goals, 18 Target,
67 Indikator

(49 tercapai, 18 belum tercapai)



SDGs

17 Goals, 169 Target,
241 Indikator



Penyempurnaan:

Lebih Komprehensif → Melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan universal

Memperluas Sumber Pendanaan (Pemerintah, Swasta, dan Sumber Lain)

Menekankan pada hak asasi manusia dalam penanggulangan kemiskinan

Inklusif → *no one left behind*

Melibatkan Seluruh Pemangku Kepentingan: Pemerintah; OMS & Media; Filantropi & Bisnis; serta Pakar & Akademisi

"Zero Goals" → Menargetkan untuk menuntaskan seluruh indikator

Cara Pelaksanaan (*Means of Implementation*)

Dari MDGS Ke TPB/SDGS : Transformasi yang Ambisius



Tujuan Baru di Dalam TPB/SDGS



9 INDUSTRI, INOVASI
DAN INFRASTRUKTUR



**Tujuan 9 Membangun
Infrastruktur yang
Tangguh, Meningkatkan
Industri Inklusif dan
Berkelanjutan, serta
Mendorong Inovasi**

11 KOTA DAN
PEMUKIMAN YANG
BERKELANJUTAN



**Tujuan 11 Menjadikan
Kota dan Permukiman
Inklusif, Aman,
Tangguh dan
Berkelanjutan**

10 BERKURANGNYA
KESENJANGAN



**Tujuan 10
Mengurangi
Kesenjangan Intra
dan Antarnegara**

16 PERDAMAIAN,
KEADILAN DAN
KELEMBAGAAN
YANG TANGGUH



**Tujuan 16 Memperkuat
Masyarakat Inklusif &
Damai, Akses Keadilan
untuk Semua &
Kelembagaan Efektif,
Akuntabel, & Inklusif**

Relevansi TPB/SDGs dengan Pembangunan Nasional



Indonesia:

- Negara Kepulauan Terbesar (17,000 pulau)
- Negara Keempat dengan Populasi Terbesar (255 Juta Orang)

Tantangan Terbesar:
Memastikan pertumbuhan yang inklusif dan pemerataan kesejahteraan untuk semua



- TPB/SDGs menawarkan kerangka pelaksanaan yang fokus pada pengurangan kesenjangan dan memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal



Komitmen Indonesia dalam Pelaksanaan TPB/SDGS

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

adalah pembangunan yang menjaga:

- peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
- kualitas lingkungan hidup;
- pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.



Komitmen:

1. Melaksanakan TPB/SDGs untuk **transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan;**
2. **Penetapan Perpres Nomor 59 Tahun 2017** tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
3. **Melaksanakan Nawacita yang selaras dengan TPB/SDGs, diterjemahkan ke dalam RPJMN 2015-2019;**
4. Presiden RI memimpin dan memantau pelaksanaan TPB/SDGs karena **pencapaian TPB/SDGs sekaligus menjadi tolok ukur tercapainya agenda pembangunan nasional.**

III. ARAHAN PRESIDEN (Sidang Kabinet Akhir Desember 2015)

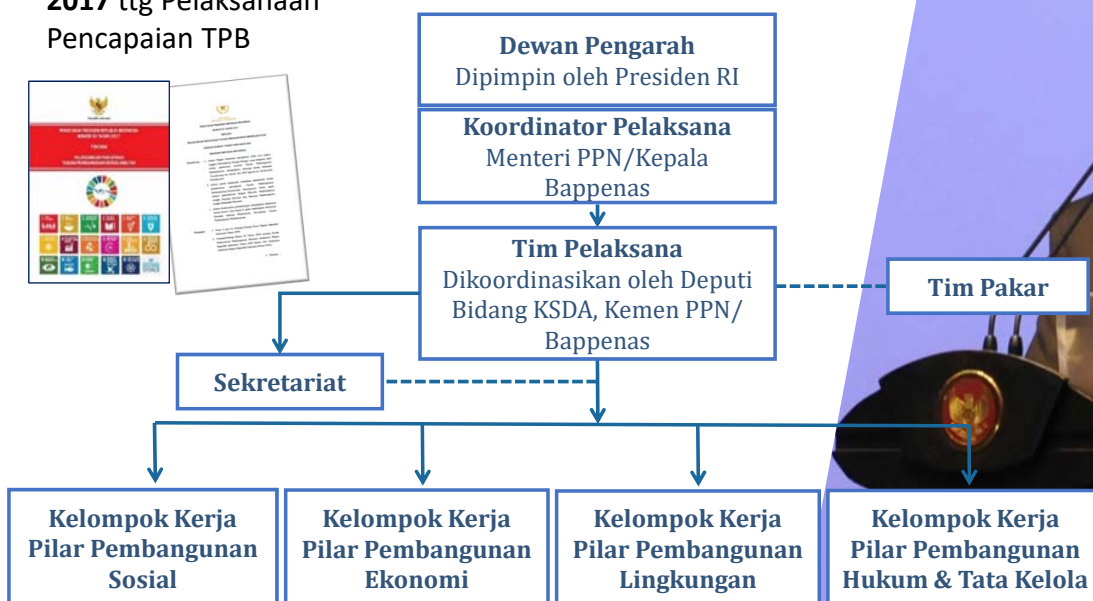
- 1. Mengoptimalkan peran koordinasi Kementerian PPN/Bappenas** dalam pembangunan, mengingat hampir seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) telah terakomodasi dalam RPJMN;
- 2. Melibatkan semua pihak (pemerintah, parlemen, ormas & media, filantropi & bisnis, pakar & akademisi)** untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak; dan
- 3. Kelembagaan bisa langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional.**



Struktur Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGS



✓ Perpres No. 59 tahun 2017 ttg Pelaksanaan Pencapaian TPB

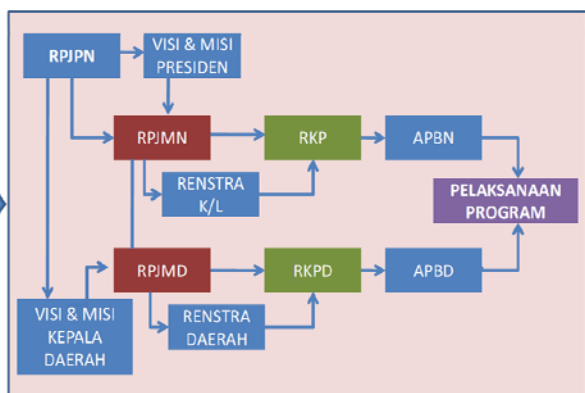


IV. PENGARUSUTAMAAN TPB/SDGS DALAM RPJMN 2015-2019



PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



KESESUAIAN TARGET GLOBAL DAN RPJMN 2015-2019

PILAR/GOAL	#TARGET GLOBAL	#TARGET RPJMN 2015-2019	HIGHLIGHT BEBERAPA PRIORITAS NASIONAL (DAFTAR LENGKAP TERLAMPIR)
SOSIAL (1, 2, 3, 4, 5)	47	25	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kemitraan • Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat • Peningkatan Kualitas Program • Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat • Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marginal
EBONOMI (7, 8, 9, 10, 17)	54	38	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian Energi • Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional • Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui • Membangun Inovativitas Nasional • Peningkatan Pembangunan Antar Wilayah • Pelaksanaan Politik LN Bebas Aduh
LINGKUNGAN (6, 11, 12, 13, 14, 15)	56	31	<ul style="list-style-type: none"> • Ketahanan Air • Membangun Perumahan dan Kawasan Pemukiman • Peningkatan Perubahan Iklim dan Pendidikan Informasi Jlim dan Kebencanaan → RAN Pengurangan Risiko GRC • Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan • Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana • Rencana Aksi dan Strategi Nasionalisasi Masyarakat Indonesia
HUKUM DAN TRTA KELOLA (16)	12	8	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kualitas Perlindungan WNI • Peningkatan Pengawasan Hukum yang Berkeadilan • Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
TOTAL	169	94	

V. PRINSIP & PARTISIPASI PARA PIHAK

Prinsip Kemitraan

Trust Building

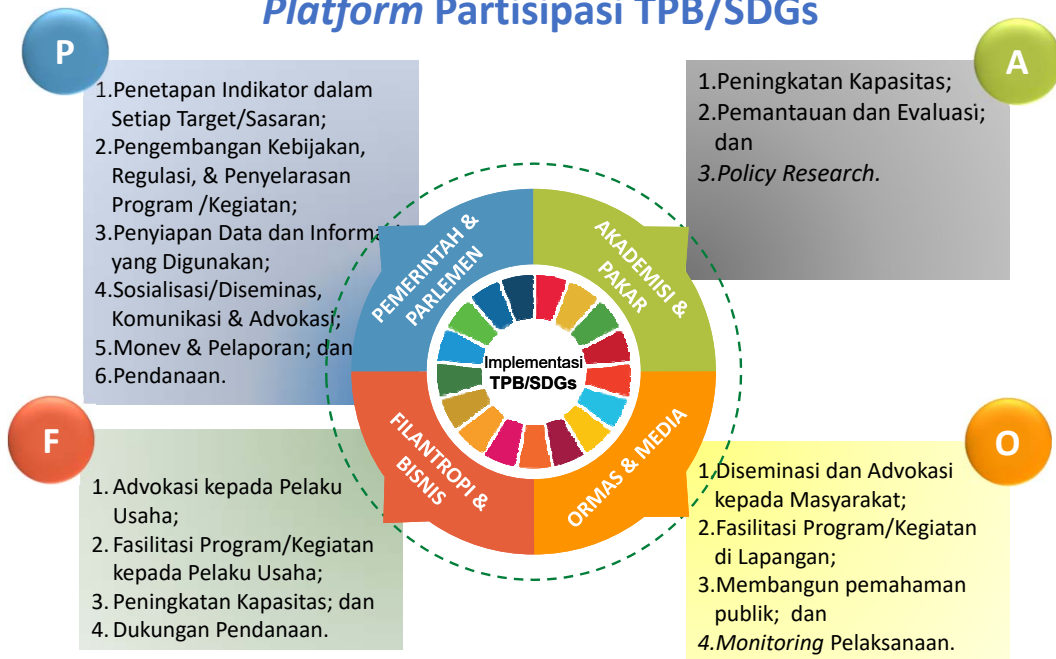
Equal Partnership

Participation

Accountable

Mutual Benefits

Platform Partisipasi TPB/SDGs



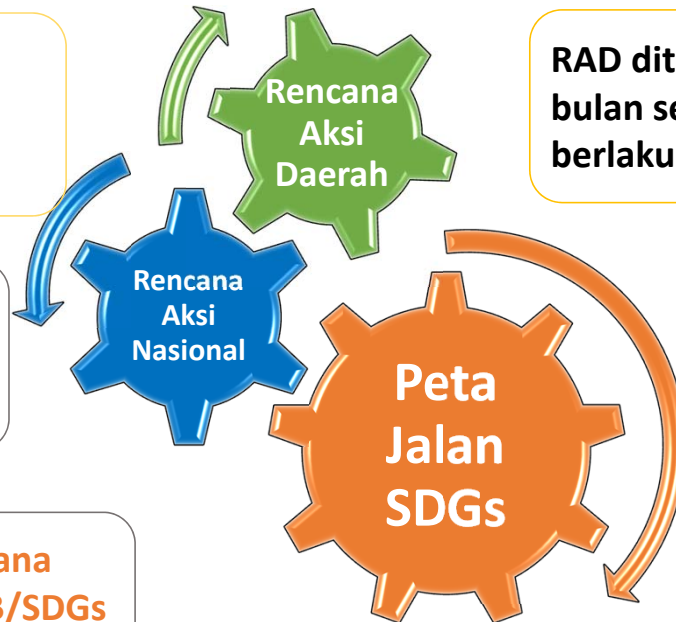
VI. BATAS WAKTU PENYELESAIAN DOKUMEN TPB/SDGS



- Dokumen Rencana Pencapaian TPB/SDGs Tingkat Daerah

- Dokumen Rencana Pencapaian TPB/SDGs Tingkat Nasional

- Dokumen Rencana Pencapaian TPB/SDGs Tahun 2017-2030



RAD ditetapkan 12 bulan setelah Perpres berlaku (10 Juli 2018)

RAN ditetapkan 6 bulan setelah Perpres berlaku (10 Januari 2018)

Peta Jalan ditetapkan 12 bulan setelah Perpres berlaku (10 Juli 2018)

VII. SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN (1/2)



1. Optimalisasi Penerimaan Negara

- Pajak, Cukai, PNBP, Grant, dan Retribusi.

2. Sumber pendanaan non- pemerintah

- Masyarakat yang berasal dari para Filantropi
- Dana sosial keagamaan dalam bentuk Zakat, Infaq, Shadaqah, Perpuluhan, Kolekte, Dana Punia dll
- Pelaku Usaha dalam bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* → *not one time CSR – should be sustainable CSR*

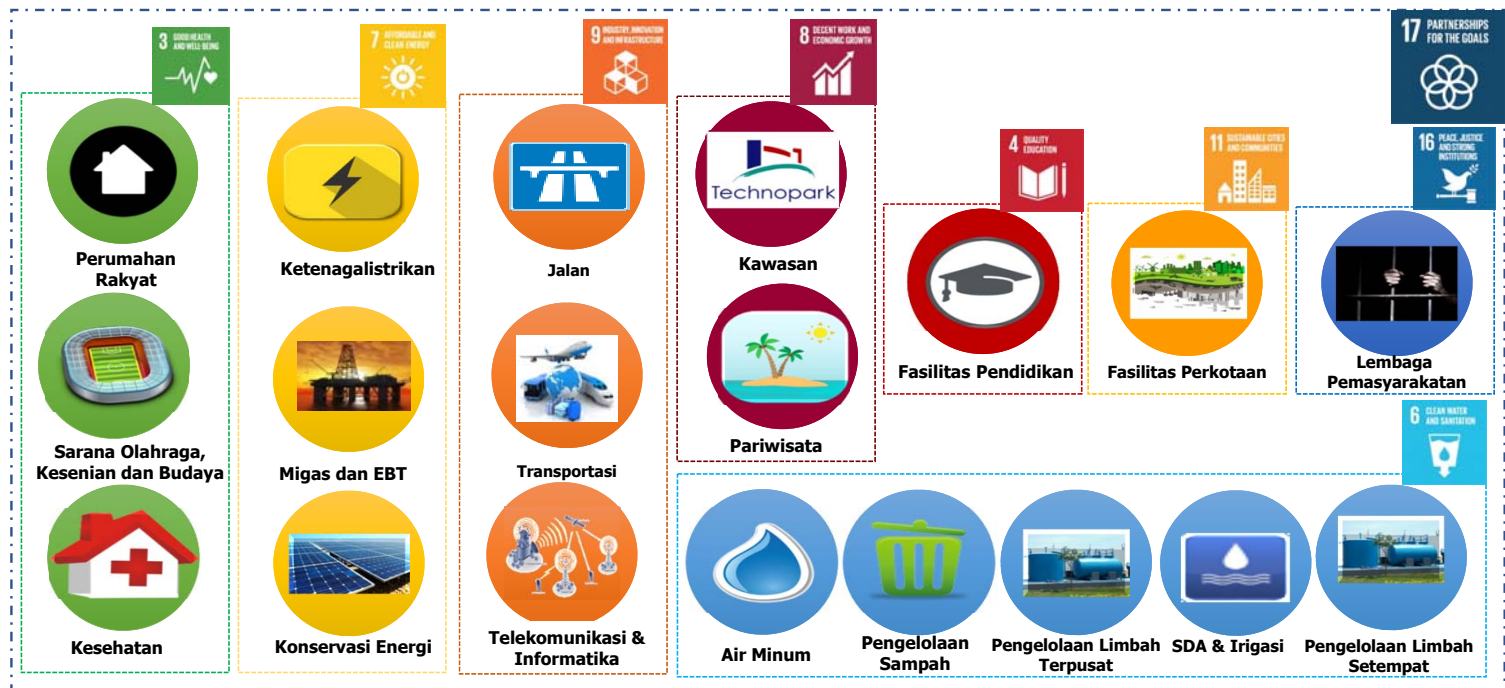
VII. SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN (2/2)



3. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat (*business approach*)

- PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah);
- PPP (*Public Private Partnership*) / Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- *Blended Finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi);
- Pembiayaan inovatif melalui pasar modal (mis: Kehati Index) & pasar uang (*green bond*);
- Pengembangan pembiayaan berkelanjutan melalui berbagai Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll);
- Pengembangan mekanisme *debt swap to SDGs*; dan
- Pengembangan mekanisme *impact investing*.

19 Sektor Proyek KPBU Yang Mendukung Pencapaian TPB/SDGS

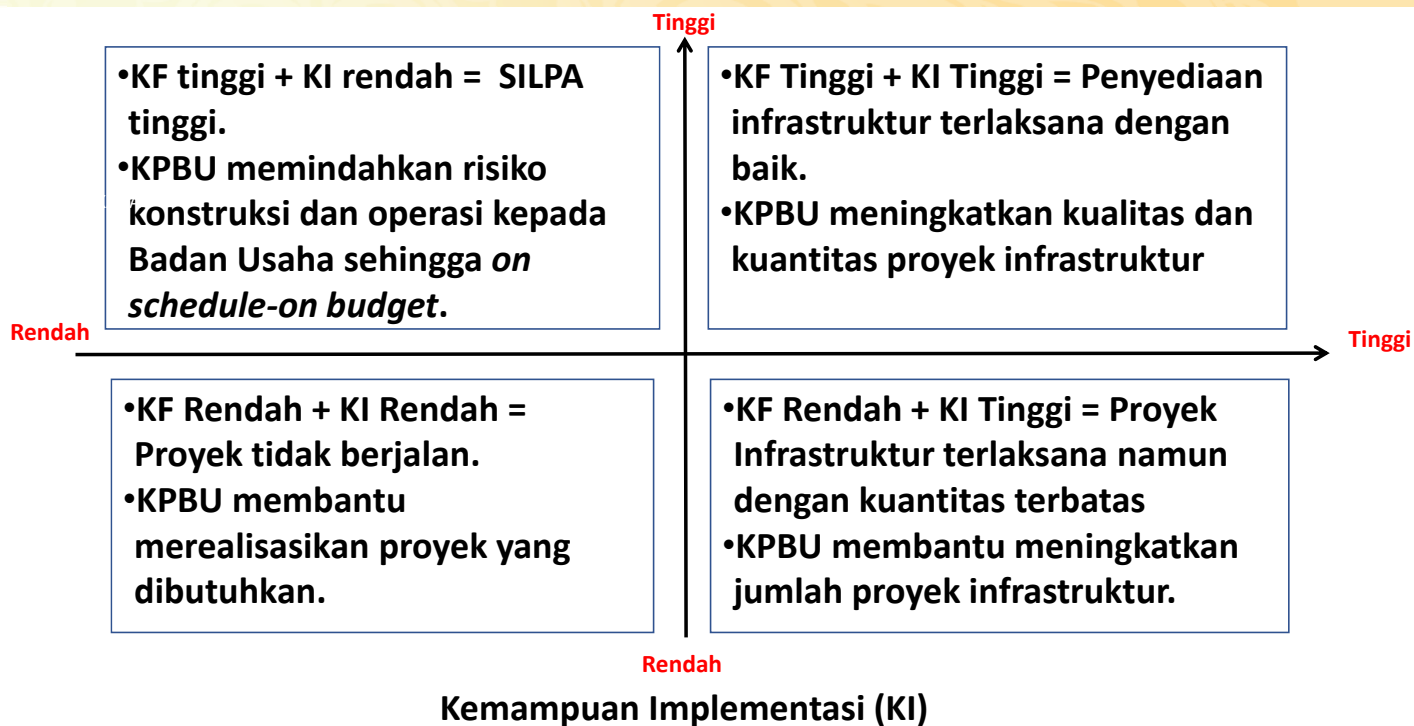


Solusi Melalui KPBU

...meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur...



Kapasitas Fiskal (KF)



Regulasi KPBU



Aspek	Pengaturan	
Subyek Kerjasama	<u>Pemerintah</u> 1. Menteri 2. Kepala Lembaga 3. Kepala Daerah 4. BUMN/BUMD	<u>Badan Usaha</u> 1. BUMN/BUMD 2. Badan Usaha Asing 3. Perseroan Terbatas 4. Koperasi
Obyek Kerjasama	Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial (19 Jenis Infrastruktur)	
Kontribusi Pemerintah	1. Pembiayaan Sebagian KPBU 2. Dukungan pemerintah 3. Jaminan pemerintah	
Pengembalian investasi Badan Usaha	1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (<i>User Charge</i>). 2. Pembayaran ketersediaan layanan (<i>Availability Payment</i>). 3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan.	
Tahapan	1. Tahap Perencanaan 2. Tahap Penyiapan 3. Tahap Transaksi	



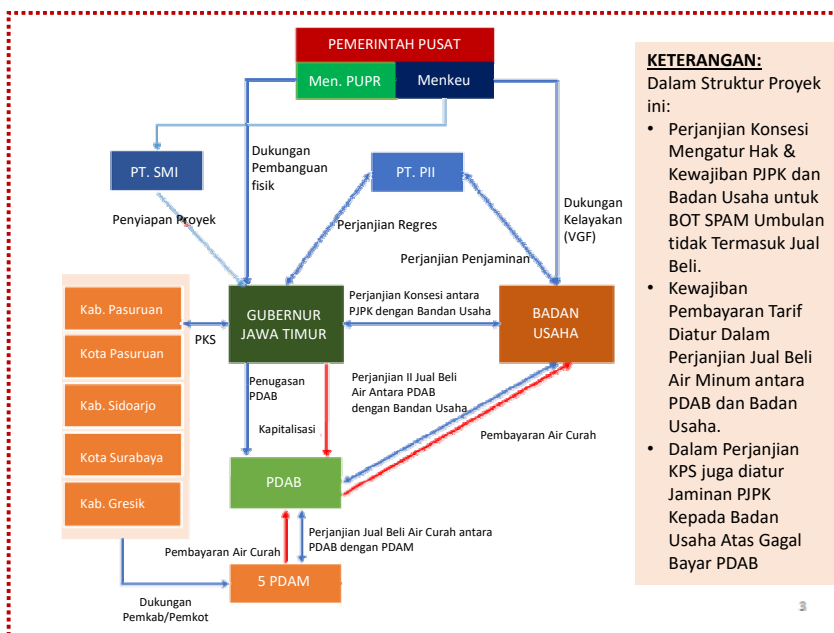
Skema Tarif dan VGF

...Me-leverage Dana Pemda...



CONTOH KPBU DENGAN PENGEMBALIAN TARIF + VGF

Proyek KPBU SPAM Umbulan



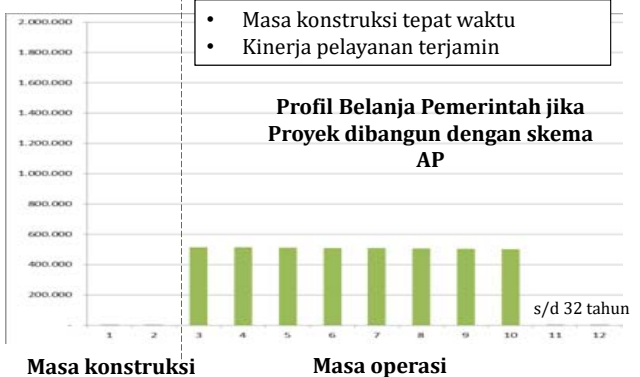
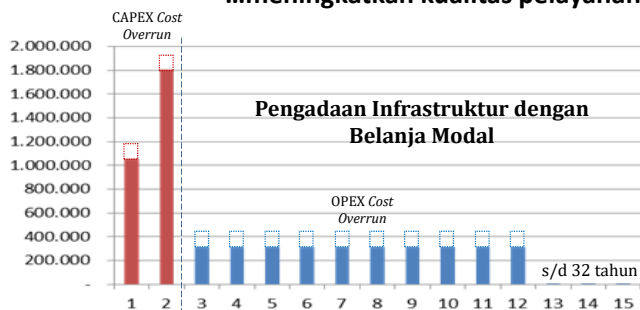
Leverage dana Pemda berupa:

1. Dukungan sebagian konstruksi dari Kementerian PUPR, dan
2. Dukungan VGF dari Kementerian Keuangan

KPBU Menambah Ruang Kapasitas Fiskal Daerah, Mengurangi Risiko, dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan



...meningkatkan kualitas pelayanan, menghemat 20,3%, meratakan beban anggaran...



- Masa konstruksi tepat waktu
- Kinerja pelayanan terjamin

Masa konstruksi Masa operasi

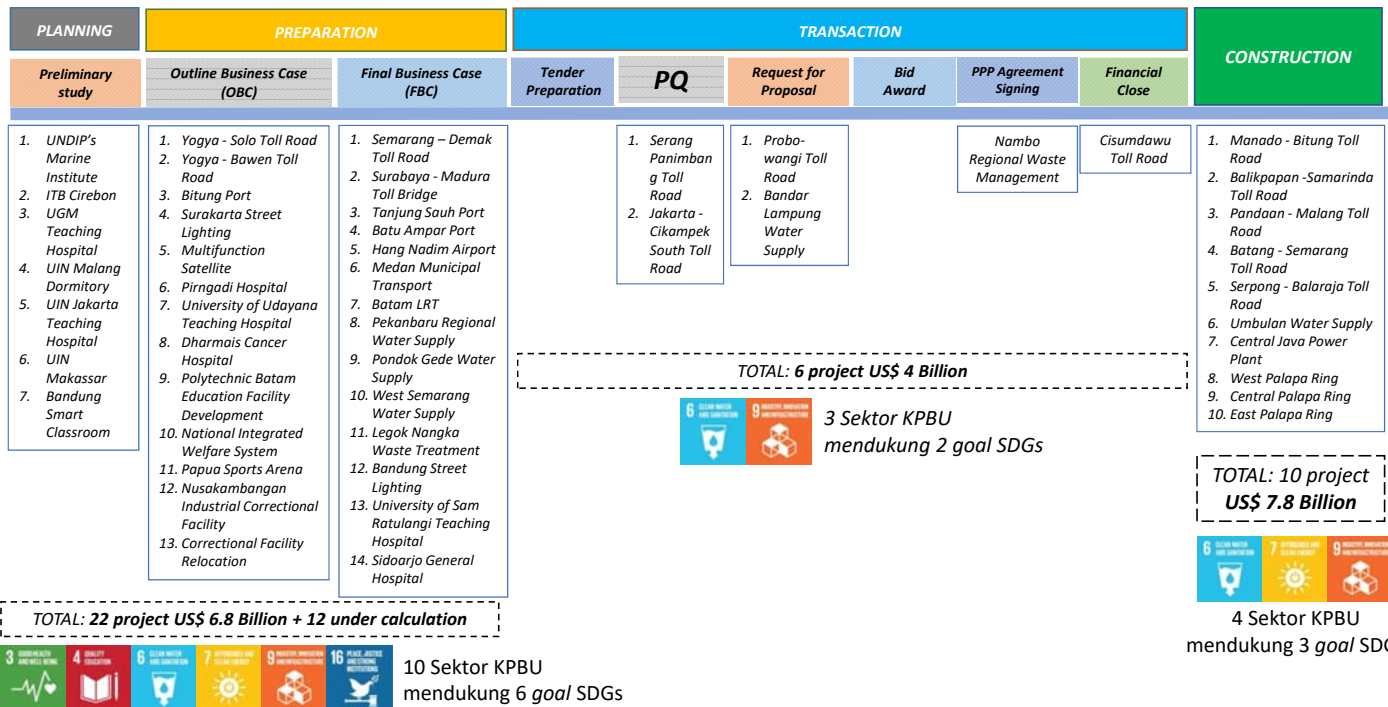
Analisis Potensi <i>Government Saving</i> pada Proyek Palapa Ring			
		PSC	PPP
<i>Government Expenditure</i>			
	-CAPEX	4,743,922,993,248	0
	-OPEX	3,369,789,444,263	0
	-Availability Payment	0	8,823,556,862,337
	-Financing	332,074,609,527	0
	-Ancillary	474,392,299,325	711,588,448,987
<i>Risk Value</i>			
	-Competitive Neutrality	0	(792,398,870,316)
	-Retained Risk	2,049,442,259,087	
Total Government Expenditure Including Risk		10,969,621,605,450	8,742,746,608,165
Government Saving			20.30%

- Untuk *Ancillary cost*, yang sebagian besar dari biaya penyiapan proyek. Untuk PPP diperkirakan 1.5 kali lebih besar dari PSC
- *Competitive Neutrality*, pada PPP terdapat potensi pembayaran PPh 25 dari *Earning Before Tax (EBT)* berdasarkan proyeksi keuangan untuk masing-masing Paket.
- *RETAINED RISK* = CAPEX Cost Overrun + OPEX Cost Overrun

PSC = Public Sector Comparator	Suku bunga obligasi 2017	7.5%
PPP = KPBU - AP	Inflasi 2010-2017	5.4%

PPP Project Pipeline

10 proyek konstruksi dan 40 proyek sedang dilaksanakan



Kantor Bersama KPBU



KANTOR BERSAMA KPBU REPUBLIK INDONESIA

PPP Office Government of Indonesia



Koordinasi



Fasilitas



Capacity Building



Percepatan
Pelaksanaan
KPBU di Indonesia



Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
(Persero)
Capital Place, 7th & 8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18,
Jakarta 12710 - Indonesia

- ✓ **Bappenas** dalam pemilihan proyek
- ✓ **Kemenkeu** dalam pemberian fasilitas fiskal
- ✓ **LKPP** dalam proses pengadaan

- ✓ **BKPM** dalam menjajaki minat dan nilai pasar
- ✓ **Kemendagri** dalam pemberian rekomendasi AP Daerah
- ✓ **Kemenko** Perekonomian dalam debottlenecking
- ✓ **PT. PII** dalam pemberian Penjaminan Pemerintah

Penutup



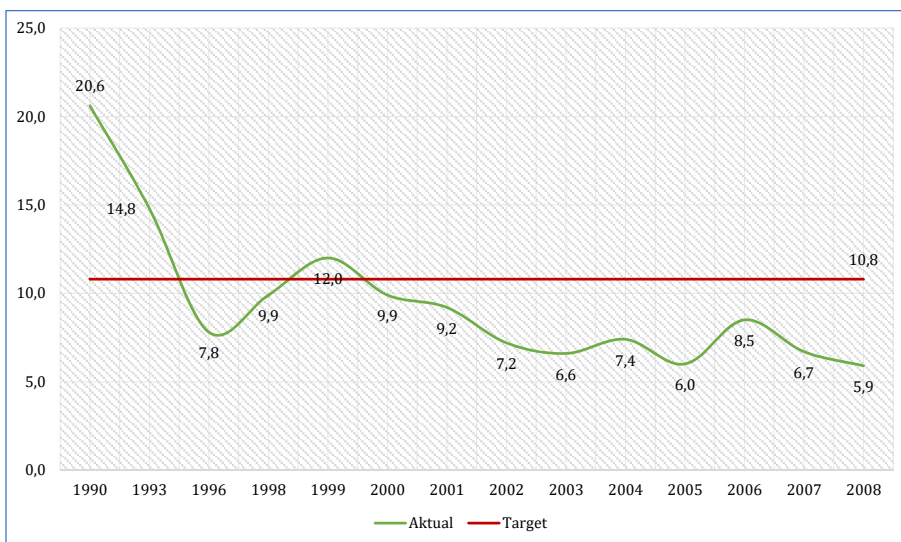
1. Integrasi TPB/SDGs dalam Agenda Pembangunan Daerah;
2. Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs di Tingkat Daerah;
3. Penyusunan RAD dengan melibatkan kabupaten/kota dan 4 *platform*; dan
4. *Monitoring*, Evaluasi dan Laporan.



TERIMA KASIH

LAMPIRAN

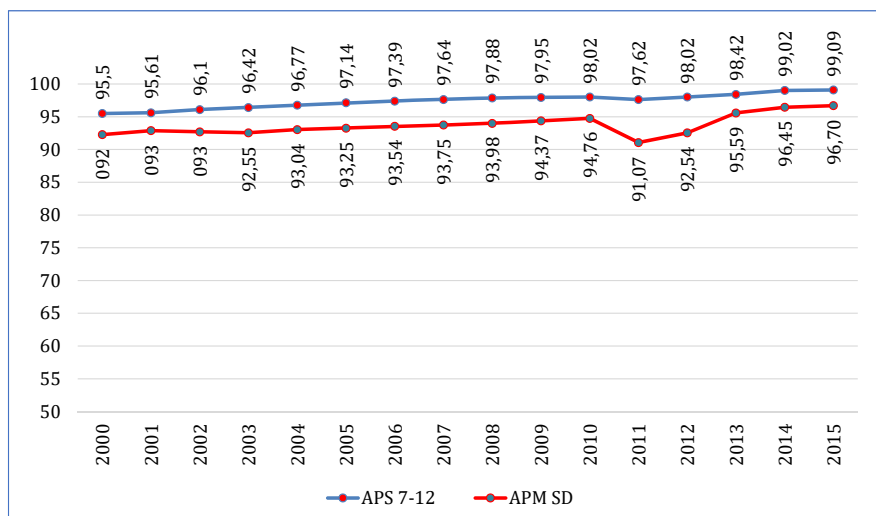
Kemiskinan Ekstrem (USD 1,00/Kapita/Hari), Tahun 1990-2008



Target MDGs : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015

Capaian : Persentase kemiskinan ekstrem telah dicapai pada tahun 2000 dan dapat dipertahankan serta bahkan diturunkan menjadi 5.9 % pada tahun 2008

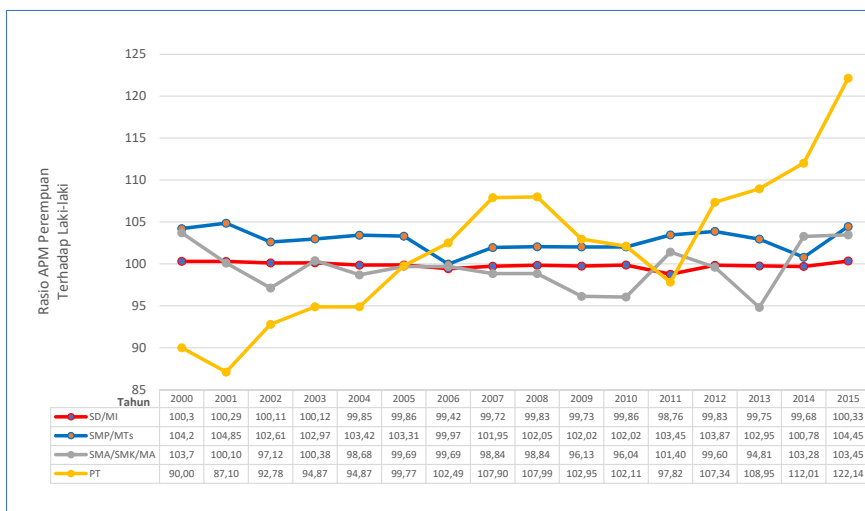
Angka Partisipasi Pendidikan Tingkat SD/MI, Tahun 2000-2015



Target MDGs : Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Capaian : Angka Partisipasi Pendidikan pada tingkat SD/MI/ sederajat terus mengalami peningkatan selama 15 tahun terakhir dan telah mencapai target MDGs.

Rasio Angka Partisipasi Pendidikan Perempuan/ Laki-laki, Tahun 2000-2015



Target MDGs : Menghilangkan Ketimpangan Gender di Tingkat Pendidikan Dasar dan Lanjutan pada tahun 2005 dan di Semua Jenjang Pendidikan Tidak Lebih dari Tahun 2015.

Capaian : Kesetaraan gender di tingkat SD/MI telah lama terwujud dan tetap bertahan hingga tahun 2015. Kesetaraan gender pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA telah terwujud meskipun penduduk perempuan usia sekolah memperoleh akses sedikit lebih tinggi daripada penduduk laki-laki usia sekolah.

Ketimpangan gender dalam pendidikan terjadi pada jenjang Pendidikan Tinggi.